

Sinergi Regional ASEAN Dalam Mengatasi Tantangan Over Tourism

**Walda Okvi Juliana Ningsih
Dewi Fortuna Sari**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

e-mail: waldaokvi.fisip@upnjatim.ac.id
dewifortuna.fisip@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

Over tourism is one of the main challenges in the Southeast Asian region that can damage the environment, threaten the sustainability of local culture, and reduce the quality of life of local communities. This study aims to analyze and develop a roadmap for ASEAN regional synergy in overcoming over tourism through innovative and sustainable strategies. Using explanatory methods and qualitative approaches, this study examines ASEAN synergy through the implementation of The Action Roadmap for Sustainable Tourism Development ASEAN and the framework of the UN World Tourism Organization. The results of the study indicate that wise destination management, diversification of tourist locations, and improvement of environmentally friendly infrastructure are the main strategies to reduce the impact of over tourism. In addition, cross-sector collaboration between the government, private sector, and local communities is considered very important for the successful implementation of this strategy. Increasing tourist awareness and systematic measurement and evaluation are also keys to success in maintaining the sustainability of tourism in the ASEAN region.

Keywords: Over Tourism, Sustainable Tourism, ASEAN, Regional Synergy, Destination Management

ABSTRAK

Over tourism merupakan salah satu tantangan utama di kawasan Asia Tenggara yang dapat merusak lingkungan, mengancam keberlanjutan budaya lokal, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan peta jalan sinergi regional ASEAN dalam mengatasi over tourism melalui strategi yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan menggunakan metode eksplanatif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji sinergi ASEAN melalui implementasi The Action Roadmap for Sustainable Tourism Development ASEAN serta kerangka kerja dari UN World Tourism Organization. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan destinasi yang bijaksana, diversifikasi lokasi wisata, dan peningkatan infrastruktur ramah lingkungan menjadi strategi utama untuk mengurangi dampak over tourism. Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dinilai sangat penting untuk keberhasilan implementasi strategi ini. Peningkatan kesadaran wisatawan serta pengukuran dan evaluasi yang sistematis juga menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keberlanjutan pariwisata di kawasan ASEAN.

Kata Kunci: Over Tourism, Pariwisata Berkelanjutan, ASEAN, Sinergi Regional, Pengelolaan Destinasi

Pendahuluan

Sektor pariwisata telah menjadi salah satu sektor utama yang memiliki perkembangan cukup cepat dan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian dan menurunkan kesenjangan pembangunan, baik bagi negara maju maupun berkembang. Sektor ini menciptakan jutaan pekerjaan langsung, terutama untuk kaum muda dan perempuan, serta menyediakan peluang investasi bagi generasi muda yang berjiwa wirausaha. sebagai contoh, sebelum pandemi COVID-19, industri pariwisata menyumbang satu dari empat pekerjaan baru di seluruh dunia dan bertanggung jawab atas 10,3% Produk Domestik Bruto (PDB) global (US\$ 9,6 triliun) (World Travel & Tourism Council 2002). Seperti halnya di negara-negara ASEAN, destinasi wisata seperti Phuket (Thailand) dan Bali (Indonesia) telah menjadi ikon pariwisata internasional yang mendatangkan jutaan wisatawan setiap tahunnya. Namun, perkembangan pesat ini membawa dampak negatif yang signifikan, terutama dalam bentuk *over tourism* atau pariwisata berlebih. *Over tourism* tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan alam, tetapi juga dapat merusak struktur sosial dan budaya lokal serta mengurangi kualitas pengalaman wisatawan.

Over tourism mengarah pada peningkatan tekanan terhadap infrastruktur dan sumber daya alam yang sudah terbatas, seperti pantai, taman nasional, dan situs bersejarah. Kapasitas pengunjung yang berlebih di suatu destinasi wisata baik wisata alam maupun buatan sedang dialami di berbagai kota di dunia. Fenomena ini biasanya terjadi secara terpusat di satu destinasi wisata tertentu yang menjadi destinasi wisata populer. Setiap pengunjung memiliki alasan untuk melakukan kunjungan ke destinasi wisata tersebut yang didorong dari segi fasilitas dan akses yang baik, hiburan atau pemandangan yang menarik seperti museum, monumen, taman hiburan, atau tempat bersejarah, sehingga banyak destinasi wisata yang mengalami fenomena overtourism.

Definisi *over tourism* dalam *Collins Online English Dictionary* merupakan fenomena dimana sebuah destinasi wisata yang sedang populer mengalami kenaikan atau “dibanjiri” oleh wisatawan dengan cara yang tidak berkelanjutan. *Over tourism* secara general dapat dikatakan sebagai *unsustainable tourism* atau wisata yang tidak berkelanjutan. UNWTO cenderung memberikan definisi pada fenomena overtourism yang berdampak pada *socio-psychological* terhadap kualitas hidup masyarakat sekitar destinasi wisata maupun pengunjung itu sendiri ke arah yang negatif (UNWTO,2018).

Selanjutnya the European Parliament's TRAN Committee (TRAN 2018) juga menambahkan dampak *socio-political* terhadap fenomena *over tourism* sehingga overtourism didefinisikan sebagai situasi dimana pariwisata berlebih berdampak pada ekologis, sosial, ekonomi, psikologi dan politik. *Over tourism* juga dapat didefinisikan sebagai situasi di mana jumlah pengunjung atau turis yang datang ke suatu destinasi melebihi kapasitas yang dapat ditampung, sehingga menyebabkan berbagai dampak negatif bagi destinasi tersebut, baik dari segi lingkungan, sosial, budaya, maupun ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat lokal maupun pengunjung.

Peningkatan jumlah pengunjung di suatu destinasi wisata merupakan salah satu hasil dari program-program promosi pariwisata yang tidak terkendali, seperti misalnya adanya paket kunjungan destinasi wisata, promo wisata hingga kemudahan untuk akses ke destinasi wisata. *Over tourism* tidak hanya disebabkan pengunjung yang melebihi kapasitas, tetapi bisa juga disebabkan karena adanya eksploitasi infrastruktur dan kawasan wisata yang berlebih dan tidak dikelola secara berkelanjutan. Di Bali, misalnya, perubahan iklim dan kerusakan terumbu karang sebagai akibat dari pariwisata yang berlebihan sudah mulai terasa. Begitu pula di Phuket, yang menghadapi masalah kemacetan dan polusi akibat lonjakan jumlah wisatawan. Untuk itu, perlu adanya upaya bersama dalam mengembangkan pariwisata

berkelanjutan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan.

Sebagai upaya mengatasi masalah *over tourism* di ASEAN, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Solusi untuk masalah ini tidak hanya terletak pada pengelolaan jumlah wisatawan, tetapi juga pada pengelolaan kualitas pariwisata yang bertumpu pada prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata berkelanjutan menjadi kunci dalam merancang strategi pengelolaan destinasi wisata yang dapat meminimalisir dampak negatif. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah dengan membangun peta jalan aksi atau *action roadmap* yang mengidentifikasi langkah-langkah konkret untuk mengatasi *over tourism* melalui kebijakan dan praktik yang berfokus pada keberlanjutan. Peta jalan ini perlu mencakup aspek pengelolaan kapasitas daya tampung wisata, pengembangan produk wisata yang lebih beragam, serta promosi pariwisata yang bertanggung jawab dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan *action roadmap* untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di ASEAN.

Melalui penelitian ini, penulis akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan *over tourism* di ASEAN, implementasi *action roadmap* untuk pengelolaan pariwisata berkelanjutan di ASEAN sehingga pariwisata berkelanjutan dapat diwujudkan dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta sosial. Sebagai bentuk pengelolaan pariwisata berkelanjutan dan *over tourism*, salah satu teori yang relevan adalah teori *carrying capacity* (kapasitas daya tampung), yang menjelaskan batas maksimal jumlah wisatawan yang dapat diterima suatu destinasi tanpa merusak lingkungan dan budaya lokal. Menurut McKercher (2002), daya tampung pariwisata mencakup dua aspek utama, yaitu daya tampung fisik (infrastruktur dan sumber daya alam) dan daya tampung sosial (persepsi masyarakat lokal terhadap dampak pariwisata).

Selain itu, konsep *sustainable tourism* yang dikemukakan oleh UN *World Tourism Organization* (UNWTO) juga menjadi dasar utama dalam penelitian ini. UNWTO mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai pariwisata yang mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan di masa depan dengan memenuhi kebutuhan industri, lingkungan, dan masyarakat setempat serta pengunjung. Adapun prinsip utama pariwisata berkelanjutan, diantaranya *pertama* tanggung jawab lingkungan yakni memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, menjaga proses ekologi yang penting, serta melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati. *Kedua*, penghormatan terhadap Budaya yakni menghargai keaslian budaya komunitas lokal, melindungi warisan budaya mereka, dan mendorong pemahaman antar budaya, dan *ketiga* keberlanjutan ekonomi yakni menjamin manfaat ekonomi jangka panjang yang didistribusikan secara adil, seperti lapangan kerja, layanan sosial, dan mengurangi kemiskinan. Lebih jauh, melalui kerangka UNWTO, terdapat strategi-strategi penting yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan *over tourism*.

Teori lainnya yang relevan adalah teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*), yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengelolaan pariwisata. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bramwell dan Lane (2011), yang menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal sangat penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Fenomena ini menjadi perhatian penting sebagai tantangan dalam pengembangan destinasi wisata yang dikelola secara kolaboratif antara pemangku kepentingan dengan masyarakat lokal di sekitar destinasi wisata.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini akan fokus pada fenomena sekaligus tantangan *over tourism* di kawasan Asia Tenggara dan peta jalan pariwisata yang berbasis pada prinsip keberlanjutan yang bisa menjadi upaya sinergi bersama di kawasan. Lebih lanjut, penelitian

ini juga akan menyoroti pentingnya kolaborasi yang bersifat inklusif dari semua tingkatan pemerintahan, komitmen, dan partisipasi aktif dari masyarakat lokal untuk menggunakan pendekatan berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata dengan mempertimbangkan tren dalam dinamika pariwisata. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana tantangan itu mempengaruhi baik komunitas lokal maupun citra pariwisata negara tersebut. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemangku kepentingan untuk merancang dan menerapkan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan *over tourism*, serta mempromosikan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) di Asia Tenggara yang lebih ramah lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi seluruh pihak, terutama masyarakat lokal.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan kajian terkait strategi dan praktik *over tourism* yang mengacu pada *Action Roadmap for Sustainable Tourism Development in ASEAN* sebagai pendekatan untuk mengatasi *Over Tourism* di Asia Tenggara dan strategi dari UNWTO untuk mengatasi *over tourism*, penelitian kualitatif dapat membantu menjelaskan bagaimana fenomena *over tourism* hadir sebagai fenomena sekaligus tantangan baru pariwisata Asia Tenggara. Data dikumpulkan melalui reviu literatur seperti analisis dokumen mencakup kebijakan nasional, dokumen *Action Roadmap for Sustainable Tourism Development in ASEAN* serta laporan UNWTO. Data dianalisis secara tematik dengan fokus pada dinamika kerja sama ASEAN dan kontribusi aktor non-negara. Ini dapat membantu memahami dampak spesifik dan strategi yang diterapkan di masing-masing destinasi wisata yang ada di dua negara tersebut dengan adanya fenomena *over tourism*. Perpaduan pendekatan kualitatif dan studi kasus pada penelitian ini akan memberikan pandangan komprehensif tentang bagaimana menentukan strategi pengembangan dan pengelolaan pariwisata secara berkelanjutan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dan masyarakat lokal di sekitar destinasi wisata secara berkolaboratif.

Hasil dan Pembahasan

Sektor Pariwisata sebagai Instrumen Penting di ASEAN

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor kunci dalam perdagangan internasional sekaligus sumber utama pendapatan bagi banyak negara berkembang. Di ASEAN, seperti halnya di kawasan lain, pariwisata juga bertanggung jawab atas persentase Produk Domestik Bruto (PDB) yang signifikan, yang meningkatkan lanskap usaha kecil dan menengah (UKM) regional dan peluang kerja. Berdasarkan UN *World Tourism Organizations* (UNWTO), dari tahun 2010 hingga 2019, kedatangan pengunjung internasional (International Visitor Arrivals/IVA) di ASEAN meningkat 96% dan penerimaan pariwisata internasional sebesar 115%. Pertumbuhan pariwisata di ASEAN ini dapat dijelaskan melalui fenomena globalisasi yang berdampak pada peningkatan konektivitas udara dan keterbukaan visa, kelas menengah yang berkembang di kawasan tersebut, prioritas pemerintah terhadap pariwisata dan investasi dalam infrastruktur, dan kedekatan geografis dengan pasar utama seperti Tiongkok, Rusia, Jepang, Korea Selatan, dan India. Sebelum COVID-10, kawasan Asia Pasifik menyambut 360 juta wisatawan internasional dan menyumbang 26% pertumbuhan pariwisata global. Di kawasan makro ini, ASEAN menyumbang lebih dari 70% pertumbuhan pariwisata dan 38% dari total wisatawan mancanegara pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, Thailand menjadi negara ke-8 yang paling banyak dikunjungi di dunia, dengan hampir 40 juta kedatangan internasional. Malaysia berada di posisi ke-14, Vietnam di posisi ke-21, Indonesia di posisi ke-28, dan Singapura di posisi ke-29.

Dalam konteks Hubungan Internasional, sektor pariwisata bukan hanya sebatas aktivitas ekonomi, tetapi pariwisata juga memiliki dimensi politik, ekonomi, budaya, dan keamanan. Aktivitas pariwisata yang mendukung konsep *people-to-people contact* menjadi inti dari

diplomasi publik sehingga mampu menjembatani perbedaan budaya dan meningkatkan pemahaman antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, pariwisata juga telah menjadi salah satu instrumen penting dalam diplomasi bahkan menjadi *soft power* yang efektif bagi negara. Sebagai alat *soft power*, pariwisata dapat memperkuat citra (*nation branding*) dan posisi negara di tingkat global.

Di kawasan Asia Tenggara, untuk memanfaatkan sektor pariwisata sebagai alat penting dalam hubungan internasional dilakukan melalui berbagai strategi, mulai dari diplomasi budaya hingga penguatan integrasi regional. Misalnya melalui diplomasi publik dan *nation branding* membangun citra positif melalui slogan seperti "*Amazing Thailand*", "*Wonderful Indonesia*", dan "*Malaysia Truly Asia*" yang bertujuan meningkatkan daya tarik global. sebagai kawasan yang kaya akan budaya lokal, seni, kuliner, tradisi, hingga warisan sejarah seperti Angkor Wat (Kamboja), Borobudur (Indonesia), dan Hue Imperial City (Vietnam), dan lain-lain. selain itu, kegiatan budaya yang sering diselenggarakan misalnya Festival Songkran di Thailand atau Tari Kecak di Bali. Melalui aktivitas ini dapat memperkenalkan nilai-nilai budaya lokal yang dapat memperkuat hubungan internasional berbasis budaya.

Melalui kerangka ASEAN, negara-negara Asia Tenggara bekerja sama untuk mempromosikan kawasan sebagai satu destinasi pariwisata yang terintegrasi. Program seperti *Visit ASEAN Year* dan pengembangan rute wisata lintas negara, seperti *Mekong Tourism Corridor*, menunjukkan bagaimana pariwisata digunakan untuk mempererat hubungan antarnegara anggota ASEAN. Pariwisata lintas batas digunakan untuk memperkuat hubungan antara negara yang berbagi kawasan geografis atau memiliki sejarah konflik. Contohnya adalah inisiatif pariwisata antara Thailand dan Kamboja di kawasan Angkor Wat dan Preah Vihear. ASEAN juga mendukung pengembangan pariwisata lintas negara untuk memperkuat hubungan regional, misalnya, rute wisata Sungai Mekong yang melibatkan Laos, Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Selain itu, berbagai implementasi sudah dan terus dilaksanakan, misalnya melalui Bali Democracy Forum (BDF) sebuah forum diplomatik untuk mempromosikan demokrasi dan kerja sama internasional, konsep Halal Tourism oleh Malaysia dan Indonesia memanfaatkan pariwisata halal untuk menarik wisatawan dari negara-negara mayoritas Muslim, Singapore Tourism Board (STB) untuk menarik konferensi internasional dan meningkatkan perannya sebagai pusat keuangan dan bisnis global.

Pariwisata juga perlu dievaluasi berdasarkan prinsip keadilan global dan keberlanjutan. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan pariwisata yang membawa manfaat, adil, menghormati hak-hak masyarakat lokal, lingkungan, dan warisan budaya. Meskipun ada pengembangan pariwisata, bukan berarti tanpa konsekuensi. Pariwisata juga dapat menjadi sumber kerusakan lingkungan dan polusi, konsumen utama sumber daya yang terbatas, serta penyebab dampak negatif dalam masyarakat. Pada tahun 2019, pariwisata mencapai puncaknya, tetapi banyak destinasi di seluruh dunia mengalami dampak akibat pembatasan perjalanan global. Tekanan dari jumlah pengunjung yang berlebihan telah membuat masalah terkait infrastruktur, sumber daya lokal, dan lingkungan semakin terasa sehingga menciptakan *over tourism*. *Over tourism* menggambarkan kondisi di mana baik penduduk lokal maupun pengunjung merasa bahwa jumlah wisatawan di suatu destinasi terlalu banyak atau melampaui kapasitas, sehingga kualitas hidup di area tersebut atau pengalaman yang diperoleh menjadi menurun secara signifikan. *Over tourism* merupakan kebalikan dari *sustainable tourism* dan *responsible tourism* yang berusaha menciptakan suatu tempat wisata yang lebih baik baik untuk ditinggali oleh masyarakat lokal maupun lebih menarik untuk dikunjungi para wisatawan. Lebih jauh, *over tourism* dapat mengarah pada berbagai masalah, seperti kemacetan, kerusakan lingkungan, dan penurunan kualitas hidup masyarakat lokal. Infrastruktur yang ada sering kali tidak memadai untuk menangani lonjakan jumlah pengunjung, baik dari domestik maupun mancanegara.

Di kawasan Asia Tenggara, *over tourism* (pariwisata yang berlebihan) dan kepadatan di lokasi-lokasi terkenal serta situs warisan seperti Phuket dan Bali menyebabkan degradasi

lingkungan, tantangan dalam pengelolaan limbah, dan penggunaan sumber daya air yang berlebihan. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai komodifikasi budaya lokal, di mana tradisi disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata massal. *Over tourism* hadir menjadi fenomena sekaligus tantangan baru bagi sektor pariwisata termasuk di kawasan Asia Tenggara.

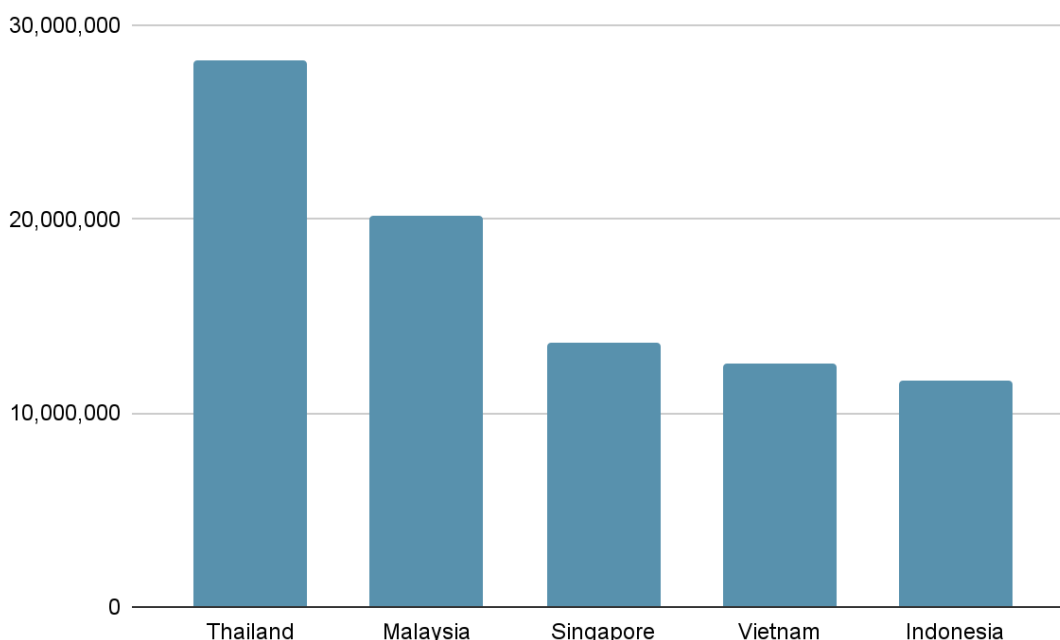
Di tengah fenomena dan tantangan tersebut, penting bagi Asia Tenggara untuk memiliki pariwisata yang direncanakan dan dikelola dengan baik dengan mengadopsi prinsip pariwisata berkelanjutan. Pendekatan pariwisata yang lebih berkelanjutan sesuai dengan *Action Roadmap for Sustainable Tourism Development in ASEAN* dapat menjadi strategi dan praktik yang optimal. Pariwisata berkelanjutan berfokus pada pelestarian lingkungan, pengembangan ekonomi lokal yang inklusif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang seimbang, di mana kebutuhan wisatawan tidak mengorbankan hak dan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini mencakup upaya untuk pemasaran destinasi tunggal, standar kualitas, pengembangan sumber daya manusia, konektivitas, investasi, partisipasi masyarakat, keselamatan dan keamanan, serta pelestarian warisan alam dan budaya yang dihadapi oleh pembangunan ASEAN sebagai destinasi pariwisata yang kompetitif, berkelanjutan, dan lebih inklusif serta terintegrasi secara sosial-ekonomi. Hal ini sejalan dengan Visi Pariwisata ASEAN 2025 yang terdapat dalam ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025:

“By 2025, ASEAN will be a quality tourism destination offering a unique, diverse ASEAN experience, and will be committed to responsible, sustainable, inclusive and balanced tourism development, so as to contribute significantly to the socioeconomic well-being of ASEAN people.”

Untuk mewujudkan visi pariwisata ASEAN pada dekade berikutnya, perlu untuk menyelesaikan dan melanjutkan inisiatif yang ada seperti pemasaran ASEAN sebagai destinasi tunggal, implementasi standar pariwisata ASEAN, dan implementasi ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals* (MRA-TP), mengadopsi pendekatan baru dan inovatif untuk pengembangan dan pemasaran destinasi dan produk; mengarusutamakan inisiatif pariwisata subregional yang ada seperti Greater Mekong Subregion (GMS), Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Philipina East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dan Indonesia, Malaysia, dan Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di dalam ASEAN, dan bekerja sama dengan lembaga lain yang mengendalikan atau mempengaruhi konektivitas utama, investasi, keselamatan dan keamanan, serta tantangan pelestarian warisan alam dan budaya terhadap integrasi dan pengembangan pariwisata ASEAN.

Fenomena dan Tantangan *Over Tourism*

Negara di kawasan Asia Tenggara memiliki daya tarik wisatawan masing-masing baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Banyaknya jumlah destinasi wisata populer menjadi daya tarik setiap negara untuk dikunjungi oleh para wisatawan karena daya saing suatu negara salah satunya dapat diperoleh dari sektor pariwisata. Terlebih apabila destinasi wisata yang populer tersebut dapat menarik wisatawan mancanegara untuk melakukan kunjungan wisata maupun tujuan lainnya. Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan ini dapat mencerminkan tingkat minat atau *visit intention* masyarakat global terhadap suatu negara, yang selanjutnya dapat menunjukkan seberapa menarik dan kompetitifnya destinasi wisata tersebut di tingkat internasional (Dani Fauzi, 2024).



Grafik 1. Lima Negara di Asia Tenggara dengan Jumlah Wisatawan Mancanegara Terbanyak Tahun 2023

Sumber : data.aseanstats.org

Industri pariwisata di ASEAN telah mencatat peningkatan kunjungan wisatawan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir terutama dalam masa pemulihan pasca fenomena pandemi covid-19 yang terjadi secara global. ASEAN menjadi salah satu kawasan yang melakukan pemulihan dini terhadap dampak Covid-19 di sektor pariwisata dengan dibukanya kembali kunjungan internasional di kawasan ASEAN untuk menghidupkan kembali industri pariwisata dan meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Berdasarkan data ASEAN Stats di tahun 2023, negara dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terbanyak adalah Thailand sebanyak 28.150.016 pengunjung. Adapun 4 negara dengan wisatawan mancanegara terbanyak selanjutnya adalah Malaysia sebanyak 20.141.846 pengunjung, Singapore sebanyak 13.610.404 pengunjung, Vietnam sebanyak 12.602.434 pengunjung dan Indonesia sebanyak 11.677.825 pengunjung.

Banyaknya jumlah pengunjung wisatawan didorong oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi yang pesat, peningkatan daya beli masyarakat, kemudahan akses untuk melakukan kunjungan wisata utamanya bagi warga negara anggota ASEAN juga memberikan dampak meningkatnya kunjungan wisatawan, dan adanya upaya promosi destinasi. Selain itu secara letak geografis ASEAN yang strategis dan berdekatan dengan kawasan Asia lainnya seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan India yang menjadi pasar utama dalam melakukan promosi wisata juga menjadi faktor dalam peningkatan sektor pariwisata.

Upaya promosi wisata menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke suatu destinasi wisata. Namun, adanya upaya promosi wisata dan kemudahan akses wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi wisata, tidak sedikit menyebabkan terjadinya kepadatan pengunjung. Banyaknya jumlah kunjungan wisatawan ini seringkali tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan tata kelola pengelolaan destinasi yang memadai. Sebagai akibatnya, banyak destinasi di Asia Tenggara mengalami permasalahan *over tourism*, yaitu situasi dimana jumlah pengunjung melebihi kapasitas yang dapat ditampung pada area destinasi wisata tersebut. Ini adalah gejala dari fenomena *over tourism*.

Pertumbuhan eksponensial sektor pariwisata sejak akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21 yang didorong oleh beberapa faktor seperti globalisasi, peningkatan konektivitas penerbangan, serta promosi pariwisata massal oleh pemerintah dan pelaku industri telah menyebabkan adanya *Overtourism* di Asia Tenggara. Fenomena ini mulai menimbulkan dampak signifikan ketika destinasi-destinasi populer seperti Phuket dan Bali yang terus mengalami lonjakan kunjungan wisatawan yang jauh melampaui kapasitas daya dukung lingkungan, infrastruktur, dan masyarakat setempat.

Strategi pariwisata massal yang banyak dikembangkan oleh negara Asia Tenggara menjadikan pariwisata sebagai pilar ekonomi utama, sehingga fokus pada kuantitas wisatawan alih-alih kualitas pengalaman. Hal ini menyebabkan konsentrasi kunjungan wisatawan di lokasi tertentu tanpa perencanaan yang memadai. Hal ini diperkuat dengan adanya tren global media sosial yang membuat hanya destinasi-destinasi tertentu yang semakin populer dan pengunjung meningkat pesat sehingga memperburuk konsentrasi wisatawan di lokasi-lokasi tertentu. Kunjungan wisatawan hanya terpusat pada destinasi tertentu dan terjadi ketidakmerataan pengunjung di destinasi-destinasi lain. Selain itu, kurangnya regulasi dan manajemen pariwisata di beberapa destinasi di kawasan Asia Tenggara yang belum memiliki kebijakan keberlanjutan atau mekanisme pengelolaan wisatawan yang efektif, sehingga lingkungan alami, budaya, dan kehidupan sosial ekonomi lokal tertekan. Keterbatasan infrastruktur lokal juga membuat beberapa destinasi tidak berkembang karena tidak siap menghadapi arus wisatawan dalam jumlah besar, baik dari segi transportasi, pengelolaan limbah, maupun fasilitas umum lainnya.

Doxey's Irridex Model dan *Tourism Carrying Capacity* sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana tekanan wisatawan yang berlebihan menimbulkan *overtourism*. Contohnya, laporan UNWTO (World Tourism Organization) menunjukkan bahwa Phuket dan Bali telah menghadapi tantangan ini sejak awal 2010-an, dengan dampak lingkungan seperti kerusakan terumbu karang, polusi, dan konflik antara penduduk lokal dan wisatawan. Dengan demikian, *overtourism* di Asia Tenggara muncul sebagai akibat dari kombinasi kebijakan pariwisata yang kurang berorientasi pada keberlanjutan dan peningkatan minat wisata global yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang memadai.

Adapun dampak fenomena *overtourism* yang terjadi pada destinasi wisata populer di ASEAN seperti Bali, Phuket, Angkor Wat ini diantaranya berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan, seperti pencemaran dan sampah, yang mengancam kelestarian sumber daya alam destinasi, infrastruktur yang tidak memadai, kepadatan di area destinasi wisata yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat lokal dan wisatawan, perubahan sosial dan budaya masyarakat setempat, dan ketimpangan ekonomi, di mana manfaat pariwisata tidak tersebar merata kepada masyarakat setempat. Seperti yang dikemukakan Joppe (2018), karena fokus pada kontribusi ekonomi pariwisata, kebijakan cenderung berpusat pada cara-cara untuk meningkatkan pendapatan pengunjung, khususnya dari peningkatan jumlah wisatawan internasional. Namun, hasil yang tidak diinginkan dari pertumbuhan yang tak terkendali di banyak destinasi menunjukkan perlunya pendekatan orientasi pasar yang berkelanjutan terhadap kebijakan pariwisata (Mitchell, Wooliscroft, & Higham, 2013) di semua tingkat pemerintahan. Yang terpenting, ini melibatkan masukan dan kerja sama berbagai pemangku kepentingan.

Implementasi *The Action Roadmap for Sustainable Tourism Development ASEAN*

Penerapan pariwisata berkelanjutan di ASEAN berfokus pada 5 pilar utama yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun *action roadmap* atau peta jalan pariwisata berkelanjutan di ASEAN. Pilar tersebut tersusun berdasarkan analisis *framework* untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Figure 2: ASEAN Framework on Sustainable Tourism Development



Source: ASEAN Framework on Sustainable Tourism Development in the Post COVID-19 Era: Summary, 2023.

Gambar 1. ASEAN Framework on Sustainable Tourism Development
 Sumber: Action Roadmap for Sustainable Tourism Development in ASEAN, 2024

Adapun *framework* di atas mencakup adanya intervensi kebutuhan pengunjung (*visitors*), industri (*industry*), komunitas (*community*) dan lingkungan (*environment*) dalam pengembangan pariwisata. Selanjutnya pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan ASEAN diharapkan memiliki dampak untuk mendorong keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan keberlanjutan lingkungan, sosial, serta ekonomi. Oleh karena itu, adanya perpaduan dari intervensi antara kebutuhan serta dampak yang dihasilkan dari pengembangan pariwisata yang berkelanjutan maka dihasilkan fokus 5 pilar dalam penyusunan *action roadmap* pariwisata berkelanjutan di ASEAN. Penyusunan *action roadmap* ini juga dihasilkan melalui survei yang dilaksanakan di negara-negara anggota dengan menyoroti tantangan fenomena overtourism serta penerapan pariwisata berkelanjutan di ASEAN. Adapun prioritas utama di dalam *action roadmap* pariwisata berkelanjutan di ASEAN diantaranya, (1) *Sustainable economic growth* Sustainable Economic Growth mengacu pada proses pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada pencapaian kesejahteraan jangka panjang. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan memiliki prospek untuk menyejahterakan dan menguntungkan bagi semua sektor. Strategi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat diintervensi melalui pengambilan keputusan yang dilakukan oleh *stakeholder* terkait kebijakan pariwisata berkelanjutan dan kebijakan tentang lingkungan. Strategi ini lebih mengedepankan bagaimana peran institusi sebagai pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan untuk menentukan arah kebijakan dalam rangka pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan tetap menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Strategi selanjutnya adalah penerapan *green investment* yakni merujuk pada investasi yang dialokasikan sebagai insiatif pembangunan proyek infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, pengurangan emisi karbon, dan perlindungan sumber daya alam. Tujuan utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan tetapi tetap memiliki dampak secara sosial dan ekonomi. Penerapan *green investment* ini juga mendorong pemanfaatan teknologi yang canggih dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Green investment ini dapat dilaksanakan untuk memenuhi target keberlanjutan di sektor ekonomi dan pariwisata. (2) Inklusivitas sosial, penciptaan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan, yakni inklusivitas sosial menjadi prioritas penting dalam menerapkan pariwisata yang berkelanjutan untuk mendorong adanya industri pariwisata yang memberikan manfaat bagi masyarakat lokal serta prinsip inklusivitas di berbagai sektor.

Industri pariwisata memberikan peluang terhadap adanya keterlibatan aktif dari kelompok rentan seperti disabilitas, kaum perempuan, kaum minoritas, dan generasi muda. penyusunan strategi dalam rangka mewujudkan inklusivitas sosial dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pengelolaan internal pariwisata terkait tingkat upah tenaga kerja, perlindungan kelompok rentan, serta peningkatan kualitas layanan pariwisata. tentu strategi ini juga perlu didukung oleh peran aktor yang bewenang dalam merumuskan kebijakan yang dapat mengatur serta berkomitmen dalam menangani inklusivitas sosial. Strategi selanjutnya ada pemerataan manfaat pariwisata yang bersifat adil. Manfaat dari aspek sosial dan ekonomi secara langsung dan tidak langsung dalam penerapan pariwisata yang berkelanjutan harus terdistribusikan secara merata kepada masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata. selain itu, manfaat tersebut juga harus dapat dirasakan oleh semua pengunjung sehingga dapat merasakan pengalaman pariwisata.

Kemudian memberikan dukungan terhadap UMKM dengan memberikan akses ke modal usaha dan pembinaan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM). Mendukung bisnis lokal berbasis sumber daya alam dan budaya, terutama di sektor pariwisata berkelanjutan, yang dapat melibatkan lebih banyak tenaga kerja lokal. Mendorong UMKM memanfaatkan digitalisasi dalam melakukan pemasaran produk untuk memperluas pasar dan menciptakan peluang ekonomi baru. Strategi terakhir adalah mendorong keterlibatan komunitas lokal dalam melaksanakan perencanaan serta pembuatan kebijakan. (3) Efisiensi sumber daya, perlindungan lingkungan dan perubahan iklim, pandemi covid-19 sangat berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata. meskipun dampak akibat krisis covid-19 sedikit banyak telah mengalami pemulihan, akan tetapi risiko seperti berkurangnya sumber daya dan perubahan iklim menjadi dampak yang masih berlanjut. perlunya pendekatan yang kohesif dalam mengkaji pemanfaatan sumber daya lingkungan untuk sektor pariwisata. Secara keseluruhan, pariwisata di kawasan ASEAN sedang ada di kondisi tekanan yang luar biasa terkait ketahanan dan keberlanjutan akibat hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran air, hilangnya hutan hujan tropis hingga pencemaran samudra di laut. kawasan ASEAN secara geografis rentan terjadi bencana sehingga adanya perubahan iklim sangat berdampak buruk apabila tidak diimbangi dengan efisiensi sumber daya.

Dalam rangka mendorong pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, memerlukan penguatan pengelolaan sumber daya yang tepat dan efisien serta memerlukan keterlibatan semua sektor baik pemerintah dan masyarakat untuk terlibat dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan berupaya untuk mempromosikan energi bersih dan ekonomi sirkular. adapun strategi yang dapat diintervensi dalam rangka mewujudkan pariwisata berkelanjutan dapat dilakukan salah satunya melalui industri pariwisata rendah karbon dan efisiensi sumber daya. Pemerintah sebagai institusi yang berwenang dapat menginisiasikan kebijakan terkait pengelolaan limbah yang dihasilkan dari industri pariwisata dan mengurangi eksploitasi sumber daya yang berlebihan. selain itu masyarakat lokal dan pengunjung pariwisata juga dapat didorong untuk terlibat dalam efisiensi sumber daya untuk mengurangi emisi karbon melalui sosialisasi tentang jejak karbon yang ada di destinasi wisata dan cara mengurangi dampak negatifnya. selanjutnya tentu juga dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan

dapat didukung melalui strategi pelestarian lingkungan melalui konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati. (4) Nilai budaya, keberagaman dan warisan, industri pariwisata dapat meningkatkan dan memperkuat pelestarian kekayaan budaya dan warisan budaya melalui inisiatif untuk mempromosikan nagunan dan tradisi budaya. manfaat sosial-ekonomi dapat diperoleh dalam pengelolaan pariwisata budaya dan pengembangan industri kreatif. akan tetapi, pengelolaan pariwisata budaya juga perlu diperhatikan risiko yang akan terjadi seperti kerusakan fisik pada situs warisan budaya dan kesalahan penyajian praktik budaya yang justru dapat menghilangkan unsur orisinalitas dari suatu tradisi budaya. adapun strategi yang dapat dilakukan dalam pengelolaan pariwisata budaya diantaranya adalah menjaga warisan budaya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. perlindungan warisan budaya dapat dilakukan dari pemerintah maupun pengunjung destinasi wisata budaya. penegakan regulasi yang tepat dalam perlindungan pariwisata budaya sangat penting dalam menjaga situs dan praktik warisan budaya.

Selain itu, perlindungan warisan budaya juga dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai pengunjung pariwisata budaya melalui sikap saling menghargai dan bertanggung jawab terhadap warisan dan tradisi budaya yang terdapat di destinasi wisata. strategi lain yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan pada aspek budaya adalah mempromosikan budaya dan warisan lokal. dengan menumbuhkan pemahaman serta apresiasi terhadap budaya dan warisan lokal, dapat mendorong dan memperkaya pariwisata budaya yang berkelanjutan. (5) Ketahanan dalam perencanaan dan adaptasi, dalam prioritas terakhir penerapan *action roadmap* berkaitan dengan bagaimana destinasi wisata dapat bertahan dan terus beradaptasi dengan adanya krisis global. pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan perlu menyoroti terkait masalah keamanan, dimana saat ini aspek keamanan sudah mulai berkembang pasca terjadinya covid-19. aspek keamanan mulai berkembang berkaitan dengan memastikan kesehatan dan keselamatan di destinasi wisata. manajemen risiko dan kesiapsiagaan terhadap berbagai bahaya yang akan terjadi di destinasi wisata juga perlu diperhatikan. sistem peringatan dini, rencana tanggap darurat serta manajemen krisis harus tertuang pada rencana kontijensi dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.

Strategi Pengelolaan Aliran Pengunjung di Destinasi Menurut UNWTO

Dalam pengembangan pariwisata yang baik dan berkelanjutan, ada tiga elemen yang harus diperhatikan yakni keterlibatan Masyarakat, organisasi masyarakat, dan tolok ukur sumber daya komunitas dan potensi daya tarik wisata, baik yang bersifat manusia maupun fisik (Reid 2003). Berdasarkan World Tourism Organization (UNWTO), kepadatan pariwisata bukan hanya berkaitan dengan jumlah pengunjung yang datang, tetapi juga dengan kapasitas destinasi untuk mengelola aliran pengunjung tersebut. Masalah ini sering kali bersifat terlokalisasi, artinya kepadatan pariwisata lebih banyak terjadi di area tertentu daripada di seluruh kota. Selain itu, kepadatan ini bukanlah masalah yang hanya melibatkan sektor pariwisata saja, tetapi juga dapat berdampak pada berbagai sektor lain seperti transportasi, infrastruktur, dan kehidupan sosial masyarakat lokal. Meskipun solusi berbasis teknologi atau solusi pintar sangat penting dalam mengatasi beberapa aspek dari masalah ini, mereka saja tidak akan cukup untuk menyelesaikan isu kepadatan pariwisata secara menyeluruh. Pendekatan yang lebih komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan agar dapat mengelola tantangan *over tourism* lebih efektif yang mengadopsi perencanaan yang hati-hati dan memahami kapasitas dan kekhususan masing-masing destinasi.

Masih menurut World Tourism Organization (UNWTO), ada beberapa strategi yang dapat dilakukan diantaranya, (1) *Promote the dispersal of visitors within the city and beyond* atau mempromosikan penyebaran pengunjung, baik di dalam kota maupun di daerah sekitarnya. Hal ini bisa dilakukan dengan menciptakan kesadaran akan destinasi baru di sekitar kota besar yang jarang dikunjungi, seperti desa-desa atau kawasan alam yang ada di luar pusat kota. Di konteks ASEAN, promosi ini juga bisa melibatkan kerjasama antarnegara untuk saling memperkenalkan destinasi wisata yang belum banyak dikenal, (2) *Promote time-based*

dispersal of visitors Strategy atau mempromosikan penyebaran pengunjung berdasarkan waktu, untuk mengurangi tekanan pada destinasi wisata yang selalu ramai pada waktu-waktu tertentu, pengelolaan waktu ini bisa didukung oleh kalender acara atau festival yang diadakan secara bergiliran antarnegara. Misalnya, Thailand bisa mengadakan festival Songkran pada musim panas, sementara Indonesia bisa mempromosikan perayaan Tahun Baru Imlek di Bali pada bulan Januari, yang berfokus pada pengalaman yang lebih tenang dan otentik, (3) *Stimulate new itineraries and attractions strategy* atau mendorong rencana perjalanan dan atraksi baru, negara-negara di Asia Tenggara yang kaya akan keberagaman budaya dan alam. Negara-negara ASEAN bisa bekerjasama dalam merancang dan mempromosikan atraksi yang tidak hanya berfokus pada kota besar, tetapi juga mencakup destinasi luar kota yang menawarkan pengalaman budaya, alam, dan petualangan yang unik, (4) *Review and adapt regulation strategy* atau meninjau dan menyesuaikan regulasi, yakni penting bagi setiap destinasi wisata di ASEAN untuk memiliki regulasi yang fleksibel namun tetap ketat dalam mengelola jumlah pengunjung.

Setiap negara harus secara teratur meninjau dan memperbarui kebijakan pariwisata mereka untuk menangani dampak *over tourism*, seperti penetapan batasan jumlah pengunjung di tempat-tempat tertentu atau pembatasan jenis transportasi yang bisa masuk ke destinasi tertentu. Kebijakan regulasi ini bisa dipadukan dengan kerjasama antarnegara ASEAN dalam menerapkan standar dan pedoman pengelolaan pariwisata berkelanjutan. (5) *Enhance visitors' segmentation strategy* atau meningkatkan segmentasi pengunjung, yakni membuat segmentasi pengunjung berdasarkan karakteristik tertentu, seperti usia, tujuan perjalanan, atau preferensi wisata. Misalnya, beberapa negara seperti Thailand dan Indonesia dapat fokus pada wisata budaya dan spiritual, sementara negara seperti Singapura atau Malaysia lebih mengedepankan wisata urban dan teknologi. (6) *Ensure local communities benefit from tourism* atau memastikan manfaat pariwisata bagi komunitas lokal,

Pariwisata harus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi penduduk lokal, yang bisa berupa penciptaan lapangan pekerjaan, pengembangan usaha kecil, atau pelestarian budaya, (7) *Create city experiences for both residents and visitors Strategy* atau membuat pengalaman kota untuk penduduk lokal dan pengunjung. Destinasi wisata harus menawarkan pengalaman yang dapat dinikmati oleh penduduk lokal maupun pengunjung. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan dan membantu mengurangi ketegangan antara penduduk lokal dan wisatawan yang mungkin merasa terganggu oleh kerumunan. (8) *Improve city infrastructure and facilities strategy* atau meningkatkan infrastruktur dan fasilitas kota yang mendukung pariwisata, seperti jalur transportasi yang menghubungkan negara-negara tetangga, bisa sangat membantu dalam memperlancar aliran wisatawan, (9) *Communicate with and engage local stakeholders strategy* atau berkomunikasi dan melibatkan pemangku kepentingan lokal, yakni pemangku kepentingan lokal harus diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai dampak pariwisata di daerah mereka, (10) *Communicate with and engage visitors strategy* atau berkomunikasi dan melibatkan pengunjung yakni mengajak pengunjung untuk lebih sadar akan dampak kunjungan mereka terhadap lingkungan dan budaya sangat penting dalam pengelolaan aliran wisata. Melalui edukasi dan komunikasi yang baik, pengunjung dapat diubah menjadi agen perubahan yang lebih peduli terhadap keberlanjutan. Negara-negara ASEAN dapat bersama-sama mempromosikan kesadaran ini dengan mengadakan kampanye bersama yang mengajarkan pengunjung cara bertindak lebih ramah lingkungan, seperti dengan menggunakan transportasi umum, tidak merusak lingkungan, dan menghormati budaya lokal, (11) *Set monitoring and response measures* atau menetapkan langkah-langkah pemantauan dan respons, yakni pemantauan yang efektif untuk mengidentifikasi dan merespon masalah yang muncul sehubungan dengan aliran pengunjung. Pemantauan ini bisa mencakup data mengenai jumlah wisatawan, dampak terhadap lingkungan, dan reaksi masyarakat lokal terhadap wisatawan. ASEAN sebagai kawasan dapat membentuk sistem pemantauan regional yang mengumpulkan data dari berbagai negara anggota untuk mengidentifikasi tren dan potensi masalah yang mungkin muncul.

Kesimpulan

Penelitian ini mengidentifikasi dampak signifikan dari *over tourism* terhadap destinasi wisata di Asia Tenggara dan kebijakan pariwisata berkelanjutan. Hasil analisis terhadap fenomena *over tourism*, ditemukan bahwa *over tourism* menyebabkan tekanan berat pada lingkungan, masyarakat lokal, dan infrastruktur. Masalah-masalah tersebut mencakup kerusakan ekosistem, penurunan kualitas hidup masyarakat, dan ketidakmampuan infrastruktur untuk menampung volume wisatawan yang tinggi. Secara internasional, *over tourism* sering kali menimbulkan ketegangan antara negara-negara dalam hal pembagian manfaat pariwisata dan pengelolaan sumber daya. Upaya kerjasama antarnegara dan peran organisasi internasional, seperti ASEAN dan UNWTO, penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan mengimplementasikan solusi pariwisata yang berkelanjutan.

Kebijakan pariwisata berkelanjutan yang diterapkan di masing-masing destinasi menunjukkan hasil yang bervariasi. Kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis data, serta peningkatan kolaborasi regional dan internasional, terbukti lebih efektif dalam mengatasi tantangan *over tourism*. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan strategi pengelolaan pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, dan meningkatkan dialog serta kerjasama antara negara-negara dan organisasi internasional. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi dampak negatif dari *over tourism* dan memastikan manfaat pariwisata yang lebih merata dan berkelanjutan bagi semua pihak terkait. Peta jalan aksi untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di ASEAN harus berfokus pada kolaborasi, diversifikasi, dan pendidikan. Dengan menerapkan strategi dan praktik terbaik, negara-negara ASEAN dapat mengatasi tantangan *over tourism* dan memastikan bahwa pariwisata memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi, lingkungan, dan masyarakat lokal. Dengan demikian, pariwisata di kawasan ini dapat terus tumbuh dan berkembang, tanpa mengorbankan sumber daya alam dan budaya yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Upaya mengatasi *over tourism* menjadi bagian dari upaya dalam menyeimbangkan manfaat ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Melalui peta jalan dan kebijakan pariwisata Asia Tenggara tidak hanya berfokus pada pertumbuhan dan manfaat ekonomi tetapi juga berkontribusi pada kemakmuran dan keharmonisan masyarakat. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak jangka panjang dari implementasi strategi berkelanjutan dan mengeksplorasi peran teknologi dalam pengelolaan pariwisata.

Daftar Pustaka

- ASEAN Framework on Sustainable Tourism Development
ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025
Action Roadmap for Sustainable Tourism Development in ASEAN, January 2024
Bramwell, B., dan Lane, B. 1993. Sustainable Tourism: an evolving global approach. *Journal of Sustainable Tourism*. Vol. 1 (1): 2.
Dewi, Desak Putu Candra et al. (2024). Effects of Overtourism on Residents Perceptions in Ubud District (Gianyar). *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science*, 4(03), 147-159. Retrieved from <https://www.ajmesc.com/index.php/ajmesc/article/view/880>
Ketut Putu Oki Murjana. 2022. Penerapan Konsep Tri Hita Karana dalam Pariwisata Guna Meningkatkan Perekonomian Bali Pasca Pandemi Covid-19, diakses melalui <https://jurnalpost.com/penerapan-konsep-tri-hita-karana-dalam-pariwisata-guna-meningkatkan-perekonomian-bali-pasca-pandemi-covid-19/39279/>
Mihalic, T. (2020). Conceptualising overtourism: A sustainability approach. *Annals of Tourism Research*, 84. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103025>
Reid, Donald G. 2003. *Tourism, globalization and development: responsible tourism planning*. London: Pluto Press.

- United Nations World Tourism Organizations. International Tourism Highlights. Madrid Editions. 2013 2015 2018 2020
- United Nations World Tourism Organizations. International Tourism Highlights. Madrid Editions. 2013 2015 2018 2020
- World Tourism Organization (UNWTO); Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality; NHTV Breda University of Applied Sciences; and NHL Stenden University of Applied Sciences (eds., 2018), 'Overtourism'? – Understanding and Managing Urban Tourism Growth beyond Perceptions, UNWTO, Madrid, DOI: <https://doi.org/10.18111/9789284419999>.
- World Travel & Tourism Council. 2002. Travel and Tourism Economic Impact 2022: Global Trends. August 2022. London